



Implementasi Program Dana Desa untuk Bantuan Peternakan di Desa Afoan Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang

Yosina Akulas^{1*}, Petrus Kase², I Putu Yoga B. Pradana³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

falloyosina@gmail.com¹, petruskase09@gmail.com², yoga.pradana@staf.undana.ac.id³

*Penulis korespondensi: falloyosina@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Village Fund program through pig livestock assistance in improving the welfare of the community in Afoan Village, Kupang Regency. The approach used is descriptive qualitative with purposive sampling techniques, involving 15 informants consisting of village officials and beneficiary families. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The results show that the implementation of the program has not been optimal. Although communication and community participation have been running well, there are still several obstacles such as uneven distribution of assistance, weak monitoring systems, the lack of a clear timeline for fund disbursement, and technical issues such as livestock deaths reaching around 5%. The success rate of the program is estimated to be around 66%, while 33% is still in the development process. Economically, the program has not had a maximum impact on community welfare, but socially and politically, the program has gained strong support. Therefore, to improve the effectiveness of the program, improvements are needed in supervision, resource management, and the establishment of clearer regulations so that the program's objectives can be achieved optimally and evenly.*

Keywords: *Community Empowerment; Livestock Program; Policy Implementation; Village Fund; Welfare*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Dana Desa melalui bantuan ternak babi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Afoan, Kabupaten Kupang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 15 informan yang terdiri dari aparat desa dan keluarga penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum optimal. Meskipun komunikasi dan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik, masih terdapat berbagai kendala seperti distribusi bantuan yang belum merata, lemahnya sistem monitoring, tidak adanya batas waktu yang jelas dalam pengguliran dana, serta masalah teknis seperti kematian ternak yang mencapai sekitar 5%. Tingkat keberhasilan program diperkirakan mencapai sekitar 66%, sementara 33% lainnya masih dalam proses pengembangan. Secara ekonomi, dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat belum maksimal, namun secara sosial dan politik program ini mendapat dukungan yang cukup kuat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan dalam pengawasan, pengelolaan sumber daya, dan penetapan aturan yang lebih jelas agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan merata.

Kata Kunci: Dana Desa; Implementasi Kebijakan; Kesejahteraan Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Ternak Babi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam konteks ini, pemerintah menginisiasi kebijakan desentralisasi pembangunan melalui penguatan peran desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Salah satu instrumen utama kebijakan tersebut adalah program Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta didukung oleh regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 .

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Kusmana, 2018). Implementasinya menuntut tata kelola yang transparan, efektif, dan berbasis kebutuhan lokal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan, dalam hal ini, dipahami sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Riyadi dalam Totok & Purwoko, 2012) .

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang menerima alokasi Dana Desa, termasuk Kabupaten Kupang yang mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui skema Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal (Meirgin & Hyronimus, 2021) . Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan ternak babi di Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara.

Program ternak babi di Desa Afoan merupakan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pemilihan komoditas ini didasarkan pada kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya alam yang mendukung, seperti bahan pakan lokal dan lingkungan yang sesuai untuk peternakan. Selain itu, ternak babi memiliki nilai ekonomi dan sosial budaya yang tinggi di masyarakat setempat, serta berfungsi sebagai cadangan finansial rumah tangga .

Secara empiris, program ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, sebanyak 73 ekor ternak babi didistribusikan kepada 73 keluarga penerima manfaat dengan sistem bergulir. Hingga tahun 2025, sebanyak 46 ekor ternak berhasil digulirkan kembali kepada penerima manfaat lain, dengan sebagian ternak menghasilkan keuntungan ekonomi antara Rp5.000.000 hingga Rp7.000.000 per penerima . Meskipun demikian, terdapat kendala berupa tingkat kematian ternak akibat penyakit dan kurang optimalnya pengelolaan kandang.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Afoan adalah rendahnya pendapatan ekonomi yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta akses pendidikan. Oleh karena itu, program ternak babi diharapkan menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui bantuan ternak babi, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Afoan.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008), kebijakan adalah tindakan yang diusulkan untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang. Sementara itu, Anderson (2006) menekankan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar rencana. Thomas R. Dye dalam Solauddin (2010) juga menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.

Implementasi kebijakan menjadi tahap penting karena keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya. Nugroho (2003) menjelaskan bahwa implementasi dapat dilakukan melalui program atau kebijakan turunan. Dunn dan Grindle dalam Wahab (2012) menegaskan bahwa implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan proses politik, konflik kepentingan, serta distribusi manfaat.

Secara umum, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilannya dapat dilihat dari tercapainya sasaran kebijakan. Unsur penting dalam implementasi meliputi program, kelompok sasaran, dan pelaksana (Sunggono, 1994), serta diukur dari proses dan hasil (Lester & Stewart dalam Badjuri dan Yuwono, 2002).

Teori Implementasi Kebijakan

Beberapa teori utama yang menjelaskan implementasi kebijakan antara lain adalah Teori Smith (1973), yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kebijakan yang dirancang, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Selanjutnya, Teori Edwards III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada. Teori Grindle (1980) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari proses dan hasil, dengan faktor penentu yang meliputi isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*), seperti kepentingan, aktor, dan kondisi kelembagaan. Terakhir, Teori Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Konsep Program

Program merupakan penjabaran dari rencana yang berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tjokroamidjojo (1990), program adalah cara menghubungkan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan Kayatmo (1985) melihat program sebagai kegiatan yang memiliki awal dan akhir yang jelas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, program diartikan sebagai instrumen kebijakan yang terdiri dari kegiatan terencana dengan tujuan, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang jelas. Program yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, strategi pelaksanaan, perhitungan biaya dan manfaat, serta keterkaitan dengan program lain.

Keberhasilan program dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, sumber daya, serta pelaksanaan yang efektif. Dalam konteks pembangunan desa, program yang didukung oleh Alokasi Dana Desa (ADD), seperti program peternakan, dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan apabila dikelola secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kesejahteraan masyarakat Desa Afoan dalam konteks implementasi program bantuan ternak babi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik melalui data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan pengalaman informan (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2011). Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi program berdasarkan indikator yang mengacu pada model implementasi kebijakan, meliputi: (1) standar dan tujuan program, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) komunikasi dan aktivitas implementasi, (5) kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, serta (6) disposisi atau kecenderungan implementor. Fokus ini digunakan untuk menilai keterkaitan antara pelaksanaan program dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari aparat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua TPK, perangkat desa), serta masyarakat penerima manfaat program (KPM).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, serta arsip yang relevan (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran empiris di lapangan, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman pertanyaan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, dan bukti visual.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang meliputi empat tahap, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data dalam bentuk naratif atau tabel, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh data yang jenuh dan valid. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan program dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan ekonomi masyarakat melalui sistem ternak babi bergulir. Program awal diberikan kepada 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan harapan seluruh masyarakat memperoleh manfaat secara bertahap.

Namun, implementasi menunjukkan bahwa tujuan belum sepenuhnya tercapai karena:

- a. Belum seluruh masyarakat menerima bantuan,
- b. Terdapat KPM yang menjual ternak tanpa segera menggulirkan kembali.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan, yang mengindikasikan belum optimalnya pengendalian implementasi kebijakan .

Sumber Daya

Implementasi program didukung oleh beberapa sumber daya, yaitu:

- a. Sumber daya manusia, masyarakat memiliki pengalaman beternak yang cukup baik.
- b. Sumber daya finansial, dana sebesar Rp172.000.000 digunakan untuk pengadaan bibit dan pakan awal, sementara biaya pemeliharaan ditanggung oleh KPM.
- c. Sarana prasarana, tersedia, namun sebagian besar masih sederhana dan kurang terawat.
- d. Sumber daya waktu, tidak terdapat batas waktu pengguliran.

Ketiadaan batas waktu menjadi kelemahan utama karena menyebabkan proses distribusi bantuan berjalan lambat dan tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya, khususnya waktu, belum optimal dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Komunikasi dan Implementasi Program

Komunikasi kebijakan dilakukan melalui musyawarah dusun, desa, dan kecamatan, sehingga program dirumuskan secara partisipatif. Informasi juga disampaikan melalui RT/RW untuk menjangkau masyarakat.

Meskipun komunikasi berjalan cukup baik, program tidak dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES), melainkan hanya dalam bentuk berita acara. Hal ini berimplikasi pada lemahnya aspek legalitas dan pengawasan dalam pelaksanaan program .

Karakteristik Agen Pelaksana

Masyarakat sebagai pelaksana memiliki pengalaman beternak yang memadai, sehingga mendukung implementasi program. Namun, aspek monitoring belum berjalan optimal.

Data menunjukkan bahwa:

- a. Berdasarkan dari 73 KPM awal, hanya 46 KPM (66%) yang berhasil menggulirkan bantuan,
- b. Keseluruhan 33% masih dalam proses pemeliharaan,
- c. Masih terdapat 6 KPM yang belum menggulirkan bantuan setelah menjual ternak.

Lemahnya monitoring menyebabkan keterlambatan pengguliran dan tidak meratanya distribusi manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi .

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

- a. Ekonomi: program terbukti membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama bagi penerima awal, namun belum dirasakan oleh seluruh masyarakat.
- b. Sosial: masyarakat mendukung program dan merasakan manfaatnya, meskipun terdapat ketimpangan antara penerima dan non-penerima.
- c. Politik: terdapat dukungan kuat dari pemerintah desa dan masyarakat melalui mekanisme musyawarah.

Meskipun demikian, manfaat program masih bersifat parsial karena keterbatasan distribusi bantuan .

Disposisi (Sikap) Pelaksana

Pelaksana program memiliki pemahaman yang baik terhadap mekanisme program dan menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi, yaitu:

- a. Kematian ternak sekitar 5% akibat penyakit dan kurangnya perawatan,
- b. Keterlambatan pengguliran,
- c. Fluktuasi harga ternak,
- d. Kurangnya monitoring dari pemerintah desa.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun disposisi pelaksana baik, faktor teknis dan manajerial masih menjadi hambatan utama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi program Dana Desa melalui bantuan ternak babi di Desa Afoan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari belum meratanya distribusi bantuan karena sebagian masyarakat belum menerima manfaat serta adanya penerima awal yang belum melakukan pengguliran sesuai kesepakatan. Dari aspek sumber daya, program telah didukung anggaran sebesar Rp172.000.000 dengan 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun masih terdapat kendala pada sarana seperti kandang yang kurang layak dan tidak adanya batasan waktu pengguliran. Komunikasi antar organisasi berjalan baik melalui musyawarah, dan karakteristik pelaksana dinilai memadai karena pengalaman beternak yang cukup. Meskipun demikian, monitoring belum optimal sehingga pengguliran belum merata, dengan tingkat keberhasilan program sekitar 66% dan 33% masih dalam proses pengembangan. Dari aspek ekonomi, program belum memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan, namun secara sosial dan politik mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah. Kendala utama meliputi kematian ternak sekitar 5%, lemahnya pengawasan, serta ketidakstabilan harga.

Dalam proses untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah desa perlu memperkuat monitoring secara berkala sebanyak 3–4 kali dalam setahun guna memastikan kualitas pemeliharaan ternak, ketersediaan pakan, dan kelayakan kandang. Selain itu, pengawasan terhadap mekanisme pengguliran perlu diperketat agar distribusi bantuan lebih merata dan tepat sasaran, disertai penetapan batas waktu yang jelas bagi penerima manfaat dalam melakukan pengguliran. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kualitas bibit ternak yang disalurkan untuk meminimalkan risiko kegagalan serta memperkuat pendampingan dan pengawasan selama proses pemeliharaan, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2006). *Public policy making: An introduction*. Houghton Mifflin.
- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan publik: Konsep dan strategi*. Universitas Diponegoro.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Kayatmo. (1985). *Perencanaan pembangunan*. UI Press.
- Kusmana. (2018). *Manajemen keuangan desa*. CV Pustaka Setia.
- Lester, J. P., & Stewart, J. Jr. (2000). *Public policy: An evolutionary approach*. Wadsworth.
- Meirgin, & Hyronimus. (2021). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2012). *Perencanaan pembangunan daerah*. Gramedia.
- Solauddin. (2010). *Kebijakan publik*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan kebijakan publik*. Sinar Grafika.
- Tjokroamidjojo, B. (1990). *Perencanaan pembangunan*. Gunung Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.